DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

# WARTA

ISSN 2088-1975
9 772088 197569
#edisi 1. 2018

## TANTANGAN PEMERATAAN **PEMBANGUNAN**

# WARTA WANTIMPRES

*Warta WANTIMPRES merupakan media publikasi dwi bulanan yang bertujuan untuk menyampaikan profil dan kegiatan Wantimpres kepada publik secara berkala.*


***Penanggung Jawab***
*Subiyantoro*

***Pimpinan Redaksi***
*M. Arfan Sahib Sali K.*

***Editor***
*Untung Widodo*
*Veri Nurhansyah T.*

***Penyusun***
*Andhi Ilham P.*
*Aris Munandar*
*B. Bonnik Manoe*
*D. Herdiyan*
*Dian Kartika Putri*
*Fikroh Amali F. A.*
*Syahlarriyadi*

*www.wantimpres.go.id*


## PERSPEKTIF

**AGUM GUMELAR**
*Anggota*
*Dewan Pertimbangan Presiden*

*"Infrastruktur Untuk Melangkah Maju"*

**JAN DARMADI**
*Anggota*
*Dewan Pertimbangan Presiden*

*"Keberpihakan Untuk Kesejahteraan Petani"*

## DAFTAR **ISI**


01 **FOKUS**

02 **PERSPEKTIF**

06 **GALERI KEGIATAN**



***Alamat Redaksi :***
Jalan Veteran III No 2 Jakarta 10110
Telp.: (021) 3444801
Faks: (021) 3865092
email. veri.nurhansyah@setneg.go.id

ISSN 2088-1975
9 772088 197569



***Hak Cipta dilindungi Undang - Undang.***
*Dipersilahkan mengutip atau memperbanyak sebagian majalah ini dengan seizin tertulis dari penulis dan/atau penerbit.*

*Copyright © 2018*


***Foto Cover :***

*Indra Saputra*
*©Biro Komunikasi Publik*
*Kementerian PUPR*

FOKUS

# TANTANGAN **PEMERATAAN PEMBANGUNAN**

***Sri Adiningsih***
*Ketua Dewan Pertimbangan Presiden*

Ketimpangan antara wilayah Indonesia bagian barat dengan bagian timur merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi setiap rezim pemerintahan pascareformasi. Ketimpangan tersebut terjadi di berbagai sektor baik infrastruktur fisik, kesehatan, pendidikan, maupun kualitas sumber daya manusia (SDM) secara umum. "Indonesia sudah lebih dari 70 tahun merdeka, tapi ketimpangan di berbagai lini masih tinggi," ujar Ibu Sri Adiningsih, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Masalah tersebut juga menjadi perhatian utama pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Pemerintahan Presiden Joko Widodo bahkan berupaya mengubah paradigma pembangunan dari yang tadinya terkonsentrasi di bagian barat, menjadi mengutamakan dari daerah pinggiran dan desa.

Hal ini sudah secara eksplisit dimasukkan dalam sembilan agenda prioritas (Nawa Cita) yang kemudian diterjemahkan dalam RPJMN 2015-2019. Perubahan paradigma ini dari sisi konsep terlihat sederhana, tapi pada tataran implementasi membutuhkan waktu dan proses yang panjang. "Bayangkan dengan luasnya wilayah Indonesia, membangun dari pinggiran itu sebuah pekerjaan besar," ujar Guru Besar Ekonomi UGM tersebut.

Bagi Ibu Sri Adiningsih, upaya pemerataan pembangunan yang dilakukan pemerintah sekarang sudah tepat karena mencakup infrastruktur fisik dan juga peningkatan kualitas SDM dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dari sisi infrastruktur, pemerintah misalnya gencar membangun jalan-jalan baru di Papua, jalur kereta api di Kalimantan dan Sulawesi, serta pelabuhan maupun bandara baru guna meningkatkan konektivitas antara wilayah.

Pemerintah juga seoptimal mungkin menyalurkan program dana desa. Tahun ini, anggaran dana desa sudah dipatok Rp 60 triliun yang harus digunakan untuk membangun infrastruktur dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di desa. Untuk memanfaatkan dana yang cukup besar ini, perangkat desa tentu memerlukan pendampingan terutama dari kepala daerah setempat. "Peran bupati sangat besar dalam mengarahkan dan mendampingi desa dalam memanfaatkan dana desa agar sesuai kebutuhan," jelas Ibu Sri Adiningsih.

Pembangunan dari sisi infrastruktur fisik tersebut dilengkapi dengan program-program peningkatan kualitas hidup ataupun kesejahteraan masyarakat. Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat dinilai menjadi senjata utama dalam meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat. Dengan program-program tersebut, Ibu Sri Adiningsih menilai, proyek pembangunan pemerintahan Presiden Joko Widodo akan mulai dirasakan masyarakat dalam lima sampai sepuluh tahun mendatang.
*(VN)*

# INFRASTRUKTUR
## UNTUK MELANGKAH MAJU

*" Masyarakat perlu terus didorong untuk berkontribusi positif sehingga situasi sosial politik nasional dapat stabil dan kondusif "*

Bangsa yang besar adalah bangsa yang pandai belajar dari masa lalu. Ungkapan tersebut menjadi dasar Bapak Agum Gumelar, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), dalam mengamati proyek pembangunan infrastruktur yang sangat digencarkan oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Tanpa harus membuka lembaran sejarah, pada era-era sebelumnya, pembangunan infrastruktur memang terlalu terkonsentrasi di wilayah Indonesia bagian barat. Hal ini menyebabkan potensi-potensi terutama di Indonesia bagian timur tidak dapat dimanfaatkan secara optimal.

Berkaca dari fakta masa lalu tersebut, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengambil inisiatif untuk membangun infrastruktur terutama di wilayah-wilayah yang relatif tertinggal seperti Sulawesi dan Papua. "Ini sebuah keharusan agar Indonesia tidak tertinggal dari negara lain terutama China," ujar beliau kepada Warta Wantimpres.

Namun, pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia tentu tidak mudah. Ketersediaan anggaran menjadi salah satu masalah utama yang mesti dihadapi pemerintah. Pada 2018 saja, anggaran pembangunan infrastruktur mencapai Rp 410,4 triliun. Pemerintah mesti memanfaatkan seluruh peluang pendanaan yang tersedia, termasuk menarik investasi dan pinjaman luar negeri, agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan optimal.

Tantangan lain bersumber dari kondisi sosial politik yang dinilai masih rentan. Bapak Agum Gumelar menilai masyarakat perlu terus didorong untuk berkontribusi positif sehingga situasi sosial politik nasional dapat stabil dan kondusif. "Jangan mudah percaya hoaks dan selalu waspada dengan penyebaran paham-paham yang ingin memecah belah bangsa," ujar tokoh senior masyarakat Sunda tersebut. *(VN)*

***Agum Gumelar***
*Anggota Dewan Pertimbangan Presiden*

*foto : dok. istimewa.*

*Jan Darmadi*
*Anggota Dewan Pertimbangan Presiden*

# KEBERPIHAKAN
## UNTUK KESEJAHTERAAN PETANI

*" Rendahnya penghasilan petani Indonesia umumnya disebabkan oleh rendahnya harga padi petani. Dalam menjual hasil panen, petani sering kali harus berurusan dengan tengkulak yang menekan harga "*

Di tengah embusan udara segar disela pepohonan Gunung Pangrango, Warta beroleh kesempatan melakukan wawancara dengan Bapak Jan Darmadi, Anggota Wantimpres yang telah lama berkecimpung di bidang bisnis dan sosial. Saat ini perhatian besar beliau adalah pada sektor mikro kerakyatan khususnya bidang pertanian dan perkebunan.

"Pemerintah Jokowi dan Jusuf Kalla telah berkomitmen untuk wujudkan perekonomian yang berkeadilan, termasuk di sektor pertanian" ucap beliau memulai perbincangan. Upaya mewujudkan sistem pertanian yang berkeadilan di antaranya difokuskan untuk meningkatkan kesejahteraan petani sebagai penggerak utama sektor pertanian. Namun definisi mengenai kesejahteraan memiliki arti luas. Kesejahteraan tidak hanya dilihat sebagai peningkatan penghasilan atau peningkatan fasilitas namun juga *life style* . Tugas pemerintah yang terpenting adalah bagaimana meningkatkan penghasilan dan produktifitas masyarakat Indonesia. Untuk penghasilan minimum dapat mengacu pada Upah Minimum Regional (UMR) Jakarta, ujar beliau.

Beliau melihat bahwa pemerataan kesejahteraan juga dapat dipicu oleh peningkatan produktivitas. Sebagian penduduk Indonesia hingga kini masih hidup di sektor pertanian, walaupun dengan jumlah yang terus menurun. Diperkirakan dari 32 juta KK petani, telah menurun menjadi 27 juta KK petani. Jika 1 KK petani memiliki 3 anggota keluarga inti maka akan terdapat 71 juta orang yang hidupnya tergantung pada sektor pertanian. Tentunya akan sangat berbahaya jika produktifitas dan partisipasi terus menurun, dan negara tidak mampu mengelolanya.

Rendahnya penghasilan petani Indonesia umumnya disebabkan oleh rendahnya harga padi petani. Dalam menjual hasil panen, petani sering kali harus berurusan dengan tengkulak yang menekan harga. Saluran distribusi produk pertanian cukup panjang, dapat melewati 5 perantara dari petani untuk sampai kepada konsumen. Panjangnya rantai dan biaya distribusi berdampak pada penurunan dan kecilnya keuntungan bagi petani.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka peran pemerintah adalah sebagai *'Balancing Factor'*. Penghasilan petani dapat meningkat dengan adanya perbaikan kontrol distribusi oleh pemerintah, dan kepastian harga jual yang menguntungkan petani. Harga seyogyanya dipatok oleh pemerintah dan Bulog wajib untuk membeli produksi petani. Pemerintah juga sebaiknya mengurangi subsidi kepada petani agar terbangun kemandirian, namun di saat yang sama menjamin stabilisasi harga beli oleh pemerintah, keamanan jalur distribusi, dan penegakan aspek *'rule of law'* dalam ekosistem produksi dan perdagangan produk agraris, tegas Bapak Jan Darmadi. Pemerintah telah dan perlu terus meningkatkan keberpihakan pada pencapaian kesejahteraan petani, agar kemandirian pangan dan kesejahteraan sebagian besar rakyat Indonesia meningkat pada *level* mikro, dan selanjutnya mendorong capaian target ekonomi makro secara berkelanjutan. *(BM)*

*foto : AS*

# GALERI KEGIATAN

1. Bapak Suharso Monoarfa, Anggota Wantimpres, melaksanakan Pertemuan Terbatas dengan tema “Kebijakan Pengelolaan Hutang Negara dan Pembiayaan Pembangunan” di Kantor Wantimpres, Rabu, 24 Januari 2018. Hadir sebagai pembicara utama adalah ekonom senior UGM, Anggito Abimanyu.

2. Bapak Agum Gumelar, Anggota Wantimpres, menerima buku “Review Kebijakan Maritim Tahun 2017”dari Djoko Sumaryono, Plt. Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut (PPAL) di Kantor Wantimpres, Jumat, 2 Februari 2018. Acara tersebut dihadiri pula oleh para pejabat Wantimpres dan PPAL.

3. Bapak Sidarto Danusubroto, Anggota Wantimpres, menyelenggarakan pertemuan dengan tema “Dampak Penggunaan Aplikasi Pesan Sosial Media terhadap Keamanan Nasional”, pada Senin, 19 Februari 2018, di Kantor Wantimpres. Pertemuan tersebut dihadiri pula oleh Ibu Sri Adiningsih, Ketua Wantimpres dan Bapak Agum Gumelar, Anggota Wantimpres, serta para narasumber, yakni Bapak Rudiantara, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jenderal Pol. (Purn) Sutarman, Kapolri Periode 2013 s.d. 2015, Kabaintelkam Polri, dan Deputi BSSN.

4. Revolusi industri ke-4 memberikan dampak efisiensi dalam proses bisnis dan cara baru di setiap value chain dari produk, akan tetapi juga menimbulkan disrupsi di berbagai industri. Tantangan yang dihadapi adalah terjadinya shifting dilapangan pekerjaan, tantangan adaptasi dengan cepat dan hilangnya privasi. Berkaitan dengan hal tersebut, Ibu Sri Adiningsih, Ketua Wantimpres menyelenggarakan pertemuan “Ekonomi Kreatif & Digital” tanggal 18-19 Februari 2018 di Provinsi DIY yang dinilai kaya dengan ekonomi kreatif serta dianggap merepresentasikan keragaman budaya Indonesia.

5. Anggota Wantimpres, Bapak Subagyo Hadisiswoyo dan Bapak M. Yusuf Kartanegara, berfoto bersama Wakil Direktur Kepolisian Perairan Polda NTB beserta jajaran, pada kunjungan kerja ke Direktorat Kepolisian Perairan Polda NTB, di Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu, 21 Februari 2018.

6. Bapak Sidarto Danusubroto, Anggota Wantimpres, menerima audiensi Aliansi Nasional Reformasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Kantor Wantimpres, Jumat, 23 Februari 2018. Dalam audiensi yang juga dihadiri Ibu Sri Adiningsih, Ketua Wantimpres, Aliansi menyampaikan bahwa Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) dinilai masih mengandung banyak persoalan yang perlu dikaji ulang.

*Foto : Andi Ilham, Bonnik Manoe, Dhika Aburizal, Tri Murdani, Andytias D.A., Aris Munandar, Syahlarriyadi.*

# GALERI KEGIATAN

7

8

9

10

11

12

7. Ibu Sri Adiningsih, Ketua Wantimpres dan Anggota Wantimpres, Bapak Sidarto Danusubroto menghadiri *Batam Economic Forum 2018* yang mempertemukan para pejabat senior di pemerintahan, para pimpinan bisnis nasional, termasuk pebisnis dari Batam, untuk berbagi informasi strategis tentang perkembangan ekonomi Indonesia terkini, menyumbangkan dan merumuskan pemikiran-pemikiran baru guna mendongkrak perekonomian Batam dan nasional, di Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Selasa 27 Februari 2018.

8. Bapak M. Yusuf Kartanegara, Anggota Wantimpres, bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Pancasila (FHUP), menyelenggarakan Diskusi Terbatas dengan tema "Mengidentifikasi Potensi Konflik Sosial yang Mengancam Stabilitas Keamanan Nasional", di Auditoritum FHUP, Jakarta, Rabu, 28 Februari 2018.Diskusi ini bertujuan untuk menghasilkan gagasan dan pemikiran tentang bagaimana mengidentfkasi indikator potensi konflik sosial terkait kebijakan strategis pencegahan konflik sosial.

9. Bapak A. Malik Fadjar, Anggota Wantimpres, turut menghadiri acara penganugerahan gelar Doctor Honoris Causa kepada Presiden Kelima Republik Indonesia Ibu Megawati Soekarnoputri dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Jatinangor, Kamis, 8 Maret 2018.

10. Bapak A. Malik Fadjar, Anggota Wantmpres, menyelenggarakan Pertemuan Terbatas dengan tema "Kerukunan Hidup Umat Beragama dan Pembangunan Bangsa (Sudut Pandang Generasi Muda)" di Kantor Wantimpres, Selasa, 13 Maret 2018. Dalam acara itu, hadir pula Ibu Sri Adiningsih, Ketua Wantmpres, Bapak Jan Darmadi, Anggota Wantmpres, dan Bapak Agum Gumelar, Anggota Wantimpres, serta para tokoh muda lintas organisasi.

11. Bapak Jan Darmadi, Anggota Wantimpres, menyelenggarakan Pertemuan Terbatas dengan tema "Mencari Solusi atas Permasalahan Komoditas Kakao dan Jagung", di Kantor Wantimpres, Kamis, 15 Maret 2018. Dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh Ibu Sri Adiningsih, Ketua Wantimpres, dan Bapak Agum Gumelar, Anggota Wantimpres, tersebut, banyak dibahas mengenai upaya yang perlu dilakukan pemerintah guna meningkatkan pendapatan petani kakao dan jagung.

12. Bapak Agum Gumelar, Anggota Wantimpres, melaksanakan kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) dalam rangka menghadiri pengukuhan kepengurusan Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas (IKAL) Komisariat Sulsel, di Aula Gedung Pelindo IV, Kota Makassar, Provinsi Sulsel, Sabtu, 17 Maret 2018. Dalam kegiatan tersebut, Bapak Agum Gumelar menyerahkan bendera pataka IKAL kepada Bapak Syahrul Yasin Limpo, Ketua IKAL Komisariat Sulsel.

*Foto : Andi Ilham, Bonnik Manoe, Dhika Aburizal, Tri Murdani, Andytias D.A., Aris Munandar, Syahlarriyadi.*

# WARTA Edisi 1 2018

©WANTIMPRES 2018